



Fokus Cegah Kejahatan Jalanan

■ Satpol PP DIY Tak Gelar Operasi Pengawasan Prokes Saat PPKM Level 1

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY berfokus pada pencegahan aksi kejahatan jalanan atau klith. Aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) ini dipastikan tak akan menggelar operasi pengawasan protokol kesehatan (prokes) di tengah pelanggaran yang diberlakukan pemerintah.

Hal ini usat pemerintah memberlakukan PPKM level 1 di wilayah DIY. "Karena level 1 sudah kesadaran sendiri nggak perlu ada peringatan peringatan lagi. Fokus kami penegakan pelanggaran Perda yang terjadi, terutama kriminal jalanan itu," terang Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, Jumat (10/6).

Noviar menjelaskan, langkah pencegahan dilakukan dengan melibatkan kelompok Jaga Warga yang tersebar di DIY. Saat ini tercatat sudah ada 1.831 Jaga Warga yang tiap kelompok terdiri dari 25 anggota.

Pihaknya menargetkan untuk membentuk lebih dari 4.000 kelompok Jaga Warga sehingga di tiap padukuhan dapat ditemui kelompok tersebut. "Kami akan fokus membekali Jaga Warga untuk ikut melakukan pencegahan terhadap anak jalanan," ujarnya.

Menurutnya, kelompok Jaga Warga hidup di tengah masyarakat sehingga mengetahui dan memahami kondisi lingkungan di daerahnya. Mereka dianggap bisa melakukan pendekatan terhadap keluarga yang anaknya berpotensi melakukan aksi klith.

"Jadi keluarga itu mereka dekat secara persuasif. Mereka memberikan dalam bentuk fasilitasi kegiatan jadi anak muda dibertakan kegiatan. Misal keolahragaan dan kegiatan sosial. Jadi komunitas-komunitas yang diikuti menuju ke arah positif," terangnya.

Noviar menegaskan, ke-

lompok Jaga Warga lebih menekankan tindak pencegahan dibanding penindakan. Sehingga upaya yang dilakukan lebih pada metode persuasif dengan mendekati keluarga maupun anak agar mereka dapat mengisri kegiatan sehari-hari secara positif.

"Kami lebih banyak preventif pencegahan. Jaga Warga inilah mengisri kekosongan kegiatan anak muda, bagaimana anak muda diarahkan ke hal positif dan orang tua bisa berlaku sebagaimana orang tua," tuturnya.



Fokus kami pencegahan pelanggaran Perda yang terjadi, terutama kriminal jalanan itu.

Menurutnya butuh peran berbagai macam pihak termasuk masyarakat umum untuk menangani fenomena klith. Sebab, sebagian besar pelaku kejahatan memiliki masalah keluarga sehingga mereka membutuhkan keberadaan masyarakat sekitar yang juga hidup berdekatan dengan si anak.

"Semua harus terlibat tentu harus ada dukungan setiap warga dengan peduli dalam lingkungan dalam bentuk aktivitas dan melaporkannya dan lain-lain," jelasnya.

Engan penurunan level tersebut, pemerintah mengizinkan berbagai macam tempat usaha termasuk pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata beroperasi dengan kapasitas maksimal.

Begitu pula dengan pe-



nyelenggaraan berbagai macam acara sosial maupun hiburan, kini juga tak memerlukan izin atau surat rekomendasi dari Satgas Covid-19 setempat. Dengan berbagai macam kelonggaran tersebut maka kesadaran penerapan prokes kini hanya bergantung dari masyarakat itu sendiri.

Seperti semula
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, menjelaskan, ketentuan itu mengikuti poin dalam aturan PPKM level 1 di wilayah DIY. Singgih mengatakan dalam pembahasan di forum pekerja event Jogja telah diputuskan untuk izin penyelenggaraan event kembali seperti semula.

"Tentang perizinan event sekarang tidak perlu lagi ke Satgas Covid-19. Jadi izin kembali ke kepolisian," kata Singgih.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kepolisian di Poldo DIY. "Intinya Poldo menyambut baik dan siap membantu proses perizinannya," terang dia.

Dinas Pariwisata pun telah bersiap menyambut event terdekat di bulan ini, yakni pada 26 Juni 2022 ada Yogyakarta Simfoni Orchestra di Benteng Vredenburg. Dengan kapasitas penonton sekitar 500 orang. Lalu, pada 27 Juni 2022 digelar Festival Violin di tebing Breksi dengan dihadiri 500 hingga 1000 pengunjung. (tro/nda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005